

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan persoalan lama yang juga dihadapi dunia internasional. Karena hampir semua sektor ekonomi memerlukan BBM, sehingga permintaan minyak dunia terus meningkat. Sementara itu, disisi produksi ada keterbatasan sebagai sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat diperbarui. Konsekuensinya jelas, meningkatnya harga minyak mentah dunia.

Dengan harga minyak mentah di pasaran dunia sudah makin mendekati \$100 per barrel. Menurut Lemigas, dari data tahun 2005, produksi minyak mentah Indonesia adalah 1,113,400 barrel per hari. Dari total 1,113,400 barrel tersebut, tentunya setelah dipotong untuk biaya *cost recovery*, maka jatahnya KPS (Kontraktor *Production Sharing*) adalah 504,900 barrel, atau kurang lebih 45.35%. Sedangkan bagian pemerintah (termasuk produksi Pertamina) adalah 608,500 barrel, atau sekitar 54.65%.<sup>1</sup>

Kenaikan harga minyak mentah kini tidak lagi dirasakan sebagai sebuah rezeki seperti di era 1970-an lalu. Karena praktis semenjak April 2004 Indonesia telah terhitung sebagai importir minyak. Kondisi tersebut disebabkan oleh

---

<sup>1</sup> Data diatas memang adalah data tahun 2005 yang didapat dari edisi June/July 2005 The Indonesian Petro Energy.

beberapa faktor, diantaranya pertumbuhan kebutuhan minyak mentah dunia yang lebih tinggi dari perkiraan, meningkatnya ketegangan geopolitis, *bottleneck* yang terjadi pada industri pengilangan (*refinery*) dan distribusi di beberapa kawasan. Semua faktor itu memicu spekulasi kemungkinan terjadinya krisis minyak dunia di masa mendatang.

Bila menilik perkembangan harga minyak mentah dunia, semenjak awal Oktober 2004 harga minyak mentah dunia meningkat di atas US\$47 per barel. Harga itu terus naik hingga menembus US\$70 tiap barelnya pada awal September 2005 dan mencapai puncaknya pada 14 Juli sebesar. US\$79,71 per barel. Di sisi lain, data Statistik Energi yang dipublikasikan Departemen ESDM menunjukkan, sampai 2003 total jumlah cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 8,8 miliar barel. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,7 miliar barel adalah cadangan yang telah terbukti (*proven*). Sisanya sebesar 4,1 miliar barel masih berupa potensi (*indicatedlpossible*).

Jumlah itu sudah berkurang bila dibandingkan dengan pada 1992 yang mencapai 11,3 miliar barel, yang terdiri dari 5,8 miliar barel berupa cadangan terbukti dan 5,5 miliar barel masih berupa potensi. Kondisi itu jelas berpengaruh pada kemampuan produksi. Setelah 1977, produksi minyak mentah. meski terus berfluktuasi, tidak pernah lebih dari 1,6 juta barel setiap harinya. Bahkan semenjak terjadinya krisis ekonomi 1998, kemampuan produksi minyak mentah per hari Indonesia terus menurun. Jika pada 1998 Indonesia masih mampu memproduksi minyak rata-rata sebesar 1,5 juta barel per hari kini, sepanjang

bulan 2005-2006, Indonesia hanya mampu memproduksi minyak mentah rata-rata sebesar 928,4 ribu barel per hari. Sedangkan kebutuhan BBM di Indonesia per harinya adalah 1,182,900 barrel. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 1.1. di bawah ini:<sup>2</sup>

Tabel 1.1.  
Produksi, Ekspor dan Impor Minyak Mentah (juta barel)

Tahun	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Produksi	533,6	581,2	550,7	557,7	588,4	586,3	582,7	577,0	568,8	545,6	517,5
Ekspor	288,3	330,5	293,1	283,3	324,0	301,8	283,7	289,1	280,4	285,4	223,5
Impor	46,2	55,4	56,5	54,4	64,2	69,3	69,0	71,2	78,0	88,5	78,6

Sumber : Data dan Informasi Minyak dan Gas Bumi 2001, Ditjen Migas-DESDM

Sedangkan untuk produksi BBM terpenting di Indonesia ditunjukkan oleh tabel 1.2. di bawah ini :

Tabel 1.2.  
Produksi 5 Jenis BBM Penting (Ribu Kilo Liter)

Tahun	Premium	Minyak Tanah	Solar	Minyak Diesel	Minyak Bakar	Jumlah
1991	6.888,0	7,528	7,525.30	1,712.10	4,289.20	<b>21,054.50</b>
1992	7,177.90	7,790.80	11,124.20	1,922.30	4,610.00	<b>32,625.20</b>
1993	7,534.80	7,548.40	11,662.00	1,963.20	4,521.10	<b>33,229.50</b>
1994	8,567.80	8,357.90	11,682.00	1,327.30	4,180.80	<b>34,115.80</b>
1995	9,171.90	7,917.70	13,208.70	924.7	4,109.90	<b>35,332.90</b>

<sup>2</sup>[http://portal.djlpe.esdm.go.id/modules/news/index.php?\\_act=detail&sub=news\\_media&news\\_id=109](http://portal.djlpe.esdm.go.id/modules/news/index.php?_act=detail&sub=news_media&news_id=109)

1996	9,891.80	8,512.50	14,212.40	1,002.20	3,215.40	<b>36,834.30</b>
1997	10,336.20	7,628.50	13,758.50	924.7	4,109.40	<b>36,757.30</b>
1998	10,142.50	8,473.50	14,553.30	1,239.10	4,185.80	<b>38,594.20</b>
1999	11,290.70	9,415.90	14,751.10	1,332.10	4,309.90	<b>41,099.70</b>
2000	11,177.60	9,337.30	15,199.10	1,228.60	5,192.20	<b>42,134.80</b>

Pada tahun 2003, pemerintah menghapus subsidi BBM, terkecuali untuk minyak tanah bagi rumah tangga, sekaligus meluncurkan kebijakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin. Kenaikan harga jual BBM terpaksa ditempuh pemerintah. Tercatat dua kali pemerintah dan DPR RI sepakat menaikkan harga jual BBM yaitu per 1 Maret 2005 dan per 1 Oktober 2005.<sup>3</sup> Kenaikan harga jual BBM memang sulit untuk dihindari, tetapi masih seringnya terjadi kelangkaan BBM di berbagai daerah yang menimbulkan antrean panjang jelas patut menjadi perhatian serius dan menimbulkan penolakan keras di masyarakat. Untuk meredam isu tersebut, sebagai kompensasinya pemerintah meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.<sup>4</sup> Hasil penelitian INDEF (2008) sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 1.3., terdapat beberapa alternatif skenario kenaikan harga BBM yang didasarkan atas indeks harga konsumen dan pertumbuhan kemiskinan.

---

<sup>3</sup> Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.

<sup>4</sup> *Ibid*, Tanpa halaman.

Tabel 1.3.  
Skenario Kenaikan Harga BBM

Skenario kenaikan harga BBM	5%	10%	15%	20%	30%	40%
Indeks Harga Konsumen	3,6%	5,6%	7,5%	10%	13,3%	17,2%
Pertumbuhan kemiskinan	1,95%	3,6%	5,09%	6,57%	9,79%	12,6%

Sumber : INDEF, 2008

Tabel 1.3. di atas dapat dijelaskan bahwa skenario kenaikan harga BBM harus disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan pertumbuhan kemiskinan. Hal ini dikarenakan kenaikan harga BBM akan memicu terjadinya kenaikan berbagai bahan kebutuhan pokok yang akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang semakin melemah akibat berbagai kenaikan harga kebutuhan pokok yang sudah terjadi sebelumnya akan memicu terjadinya peningkatan kemiskinan.

Untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga BBM tersebut, maka salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah adalah dengan memberikan subsidi BBM. Namun, seiring dengan terus melambungnya harga minyak mentah dunia yang menyebabkan anggaran subsidi BBM menjadi membengkak dan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, maka pemerintah terpaksa menempuh kebijakan menaikkan harga BBM guna mengurangi tingkat subsidi BBM. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 1.5. di bawah ini :

Tabel 1.4.  
Subsidi BBM dan Belanja Negara

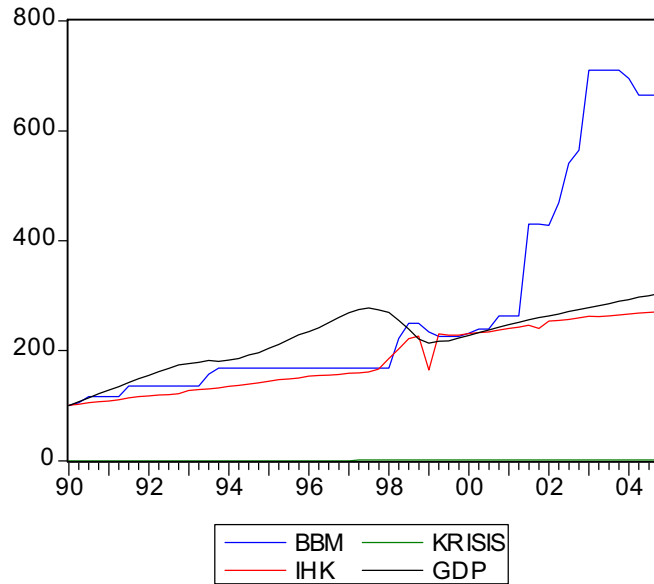
TAHUN	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Subsidi BBM (Milyar Rp)	515	354	5.029	18.783	29.610	52.173
% Subsidi terhadap belanja Negara	0,8	0,5	3,8	10,5	15,6	21,7

Sumber : Petroleum Report 1999 dan Departemen Keuangan.

Tabel 1.5. di atas menunjukkan bahwa kenaikan subsidi BBM mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 1997. Selanjutnya, pada periode berikutnya tingkat subsidi BBM dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini tentunya akan cukup menguras anggaran negara untuk alokasi subsidi BBM. Inilah yang menjadi alasan utama pemerintah untuk merumuskan kebijakan kenaikan harga BBM disamping upaya-upaya lain yang ditujukan untuk penghematan konsumsi BBM. Sehingga kondisi di atas dapat digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini :

**Gambar. 1.1.**

Kenaikan harga BBM, pertumbuhan ekonomi, dan IHK dimasa sebelum dan setelah periode Krisis Ekonomi.



Pada tahun 2006 dan 2007 produksi minyak mentah Indonesia terus mengalami penurunan secara alamiah. Sedangkan kebutuhan BBM justru sebaliknya terus bertambah. Sehingga besar kemungkinan data kebutuhan energi di tahun 2006 dan 2007 ini jauh lebih tinggi dari data tahun 2005. Seiring dengan meroketnya harga minyak mentah di pasaran dunia, makin mempersulit neraca kas Pemerintah Indonesia dan Pertamina. Menurut data ESDM (2006) cadangan minyak Indonesia hanya tersisa sekitar 9 miliar barel. Kenaikan konsumsi BBM yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ditunjukkan oleh tabel 1.6. di bawah ini :

Tabel.1.5.

## Konsumsi BBM dalam negeri Indonesia (Ribukilo Liter)

Tahun	Premium	Minyak Tanah	Solar	Minyak Diesel	Minyak Bakar	Jumlah
1991	6,828.10	8,075	12,947.60	1,724.80	4,862.90	<b>34,438.60</b>
1992	7,204.40	8,562.70	14,646.90	1,805.00	4,943.60	<b>37,162.60</b>
1993	7,440.50	8,652.40	16,565.00	1,835.30	5,112.10	<b>39,605.30</b>
1994	8,342.00	8,921.90	16,016.90	1,776.70	4,048.70	<b>39,106.20</b>
1995	9,190.40	9,252.50	16,975.00	1,601.20	4,061.40	<b>41,080.50</b>
1996	10,081.40	9,781.90	18,825.20	1,380.60	4,282.80	<b>44,351.90</b>
1997	10,831.80	9,967.40	22,119.90	1,415.80	5,426.20	<b>49,761.10</b>
1998	10,980.00	10,144.00	19,678.70	1,271.90	5,231.20	<b>47,305.80</b>
1999	11,515.50	11,926.80	17,869.80	1,309.40	5,455.80	<b>48,077.30</b>
2000	12,429.30	12,457.80	22,079.90	1,472.20	6,076.20	<b>54,515.40</b>

Sumber : Data dan Informasi Minyak dan Gas Bumi 2001, Ditjen Migas – DESDM

Adapun penjualan BBM menurut sektor pemakai ditunjukkan oleh tabel 1.7.

di bawah ini :

Tabel 1.6.

## Penjualan BBM menurut Sektor Pemakai

Tahun	Industri	Listrik	Rumah Tangga	Transportasi	Total
1991	7,420.90	5,260	7,987.20	14,903.90	35,572.00
1992	8,376.10	5,869.80	8,458.80	15,751.40	38,456.10
1993	9,069.60	6,834.40	8,532.50	16,658.80	41,095.30
1994	9,433.80	3,831.20	8,803.80	18,665.40	40,734.20
1995	10,288.50	2,968.70	9,144.80	20,431.00	42,833.00
1996	10,568.70	3,330.60	9,682.50	22,793.20	46,375.00
1997	10,935.40	6,214.00	9,860.90	24,851.90	51,862.20
1998	10,464.30	4,365.60	10,054.20	23,698.40	48,582.50
1999	9,816.50	4,088.30	11,832.10	23,465.30	49,202.20
2000	12,118.90	5,016.00	12,406.90	26,326.90	55,868.70

Sumber : Data dan Informasi Minyak dan Gas Bumi 2001, Ditjen Migas

Tabel 1.6. dan tabel 1.7. di atas menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi BBM yang terus terjadi dari tahun ke tahun menyebabkan terjadinya



peningkatan penjualan BBM khususnya pada sektor pemakai. Pemerintah sudah menyadari bahwa ketergantungan akan Bahan Bakar Minyak (BBM) mesti dikurangi. Sehingga diproyeksikanlah pencarian dan penggunaan Bahan Bakar Alternatif.<sup>5</sup> Pada tahun 2006 Presiden SBY pernah mengatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan. Untuk itu, melalui Menko Ekuin pada tanggal 22 Agustus 2006 telah dilaksanakan "Pencanangan Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif". Dan pemerintah pernah mengusulkan (bahkan sudah berjalan) untuk memanfaatkan sumber energi yang masih banyak tersedia.<sup>6</sup>

Sejak Maret 2005, saat pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM, maka pemerintah mulai menengok penggunaan sumber energi alternatif, yaitu briket batu bara. Pada waktu itu, anggota Legislatif mendesak agar pemerintah memasyarakatkan pemakaian briket batu bara karena jumlah cadangannya yang masih cukup besar. Serta merta Pemerintah, melalui Menko Ekuin-yang waktu itu adalah-Aburizal Bakrie, menyatakan akan membagikan gratis tungku-tungku briket batu bara pada masyarakat melalui Kementerian Koperasi & UKM. Di tengah menunggu realisasi proses pembuatan tungku dan pembagiannya, tiba-tiba Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan bahwa pemerintah lebih memilih memasyarakatkan elpiji dengan membuat tabung-tabung kecil yang juga akan

---

<sup>5</sup> Semakin berkurangnya persediaan energi dari fosil (krisis energi) membuat semua negara berlomba untuk menciptakan sumber energi alternatif. Di negara-negara maju, yang mempunyai teknologi canggih, sumber energi sudah banyak ditemukan. Di Indonesia sendiri, sumber energi alternatif juga telah banyak ditemukan. Cuman persoalannya adalah pemerintah tidak mau (tidakkonsisten) memanfaatkan sumber energi tersebut.

<sup>6</sup> Diatur Dalam Undang-undang Tahun 2001 tentang Energi.

membagikannya ke masyarakat bawah di perkotaan,<sup>7</sup> mengingat jumlah cadangan gas bumi di Indonesia diperkirakan akan habis tahun 2032, dan terdapat banyak sumber-sumber energi yang dapat dikembangkan.

Tabel 1.7.  
Potensi Energi yang Terbarukan di Indonesia<sup>8</sup>

Jenis sumber energi	Potensi	Kapasitas terpasang (MW)
Hidro	75,67 GW	4200
Mikrohidro	712 MW	206
Geotermal	27 GW	807
Biomassa	49.81 GW	302.4
Surya	4,8 kWh/m <sup>2</sup> /day	6
Angin	0,6 MW	0,6

Sumber : Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, 2004

Gagasan peralihan minyak tanah ke gas, juga disebabkan karena jumlah cadangan gas bumi Indonesia setara 4 kali lebih besar dari cadangan minyak yang jumlahnya sekitar 31 miliar barel. Dalam 5 tahun terakhir, produksi gas bumi mengalami kenaikan 13%. Dengan cadangan sebesar itu, maka cadangan gas yang ada cukup untuk dipergunakan selama 60 tahun ke depan. Di sisi lain, produksi minyak bumi terus menurun dari 9,8 miliar barel tahun 2000 menjadi 8,3 miliar barel pada 2005. Produksinya mengalami penurunan sekitar 11% dalam 5

<sup>7</sup> Pikiran Rakyat, 11/2006

<sup>8</sup> <http://www.chem-is-try.org/?sect=fokus&ext=47>

tahun terakhir, artinya dengan tingkat konsumsi saat ini cadangan tersebut hanya mampu bertahan 15 tahun ke depan.<sup>9</sup>

Beberapa waktu belakangan pemerintah sedang gencar menerapkan program peralihan konsumsi energi dari minyak tanah ke gas (LPG) atau yang populer dengan istilah konversi minah (minyak tanah)<sup>10</sup>. Program yang ditujukan bagi masyarakat miskin pengonsumsi minyak tanah yang "dipaksa" untuk beralih menggunakan gas, dengan cara membagikan kompor gas dan tabung gas 3 kg per KK. Yang menjadi "kelinci percobaan" pertama adalah keluarga miskin pengguna minyak tanah di wilayah Jakarta. Sebagaimana namanya "kelinci percobaan" maka yang terjadi adalah banyak kegagalan dan ketidaksiapan (jika tidak mau dikatakan tidak berhasil). Berbagai kasus muncul, mulai dari pembagian yang tidak merata, data yang tidak akurat, pasokan yang tidak lancar, hingga kualitas tabung yang buruk karena adanya kebocoran serta adanya kebakaran akibat pemakaian gas yang salah. Sementara di sisi lain penerapan konversi tersebut lalu diikuti dengan pengurangan pasokan minyak tanah ke rumah tangga yang ada di DIY. Akibat terjadinya "kepanikan" dan antrian panjang untuk memperoleh pasokan minyak tanah di agen-agen minyak tanah.

Kebijakan konversi minyak tanah di DIY telah berlangsung pada bulan Oktober 2007 silam. Pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ini juga akan

---

<sup>9</sup> TRUST. Kamis, 12 April 2007

<sup>10</sup> Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefield Petroleum Gas (LPG) akan perlunya melakukan substitusi penggunaan minyak tanah ke gas 3 Kg.

dilakukan dengan dua tahapan. Sebelumnya PT Pertamina hingga akhir 2007 menargetkan melibatkan sekitar 700.000 kepala keluarga dalam program konversi minyak tanah di Jawa Tengah dan DIY. Hingga saat ini, realisasi baru mencapai 53.900 keluarga sehingga PT Pertamina harus berusaha keras memenuhi target ini. Semula, Gas Domestik III PT Pertamina baru menargetkan kurang dari 400.000 keluarga hingga akhir tahun 2007. Namun, pada 22 Oktober, PT Pertamina Pemasaran BBM Ritel Region IV Jateng dan DIY menerima target baru, yaitu 700.000 kepala keluarga.

Tabel 1.8.  
Daftar Jumlah Pengguna Minyak Tanah & Penerima Tabung Gas (LPG)  
di Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>11</sup>

Kabupaten/Kota	Jumlah Pengguna Minyak Tanah (KK)	Jumlah Penerima Tabung Gas (LPG) (KK)
Gunung Kidul	18.508	16.860
Kulon Progo	23.188	21.124
Bantul	87.643	79.842
Jogjakarta	104.440	94.233
Sleman	119.101	108.501

Dari kelima kabupaten yang ada di DIY, Kabupaten Sleman mendapatkan giliran pertama dalam pelaksanaan konversi minyak tanah dengan sasaran 108.501 keluarga miskin. Jika uji coba konversi di DIY terealisasi, maka penyaluran minyak tanah ke provinsi ini akan dikurangi 1,26 juta liter setiap bulan.

<sup>11</sup> [http://www.dprd-diy.go.id/index.cfm?x=artikel\\_detil&id\\_berita=31102007105726](http://www.dprd-diy.go.id/index.cfm?x=artikel_detil&id_berita=31102007105726)

Menurut Bupati Sleman<sup>12</sup>, Pemerintah Kabupaten Sleman akan memprioritaskan masyarakat perkotaan sebagai sasaran utama kegiatan tersebut. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat di wilayah perkotaan yang sudah relatif lebih mengenal gas elpiji dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. "Penggunaan minyak tanah sudah puluhan tahun menjadi budaya masyarakat, terlebih di pedesaan. Akan sangat sulit mengubah kebiasaan masyarakat di pedesaan itu." Konversi minyak tanah ke gas elpiji yang terlalu cepat dijalankan di pedesaan dikhawatirkan juga akan menimbulkan berbagai persoalan. Pasalnya, penggunaan minyak tanah di pedesaan tak hanya untuk kebutuhan memasak saja, namun juga banyak dipakai sebagai sumber penerangan di daerah-daerah yang belum terjangkau aliran listrik.<sup>13</sup>

Akan tetapi jika pemerintah tetap bersikeras untuk memaksakan program konversi kebijakan minyak tanah ini, maka harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Program ini harus merupakan uji coba tanpa batas waktu. Selain dalam rangka menumbuhkan kesiapan kultur juga dalam rangka kesiapan aparat, mekanisme maupun distribusinya. Karena masih bersifat uji coba, maka tidak tertutup kemungkinan program ini tidak jadi diterapkan dulu. Terkait otonomi daerah, maka kebijakan pimpinan daerah mengambil sikap membela kepentingan warganya menjadi suatu keharusan.

---

<sup>12</sup> Kompas. Bupati Sleman Ibnu Subiyanto, Minggu (9/9/2007).

<sup>13</sup> <http://www.kompascetak.com/kompas-cetak/0709/07/jogja/1042085.htm>

- b. Perubahan apresiasi terhadap pemakaian energi yang baru pada gakin, akan sulit jika masalah utamanya yaitu kemiskinan tidak menjadi prioritas utama untuk ditangani.
- c. Karena program konversi minyak ke pemakaian gas ini adalah ditujukan bagi gakin, maka penetapan harga gas untuk kelompok ini harus ditetapkan oleh pemerintah, tidak diserahkan ke mekanisme pasar atau juga Pertamina sebagaimana harga LPG selama ini yang menjadi otoritas penuh PT Pertamina.
- d. Masyarakat konsumen memiliki hak memilih. Oleh karenanya meski ada program konversi minyak ke gas, tidak berarti bahwa minyak tanah hilang dari pasaran. Masyarakat tetap diberikan hak untuk memilih apakah tetap menggunakan kompor gas atau kembali ke minyak tanah. Biarlah masyarakat yang menentukan, jika memang kompor gas dirasakan lebih menguntungkan, maka tanpa perlu dipaksa mereka akan menggunakan kompor gas.
- e. Dan yang terakhir, harus juga turut dipikirkan tentang nasib para pengrajin kompor minyak yang ada. Jangan sampai program ini malah menambah panjang jumlah rakyat miskin, akibat hilangnya pekerjaan para pengrajin kompor minyak.

Selain beberapa hal di atas, juga yang harus diperhatikan sehubungan kebijakan ini banyak menuai protes dari masyarakat. Selain manajemen distribusinya yang buruk (ditandai dengan terjadinya banyak kekacauan di daerah, banyak masyarakat yang tidak kebagian dan terpaksa antri berjam-jam untuk

mendapatkannya, data yang tidak akurat, pasokan yang tidak lancar, hingga kualitas tabung yang buruk sehingga adanya kebocoran akibatnya menimbulkan kebakaran akibat pemakaian gas yang salah), juga ditambah persoalan semakin menderitanya pedagang kecil, seperti penjual gorengan, penjual bakso, dan sebagainya (dan ini paling penting). Namun, dibalik kebijakan konversi minyak itu, mencerminkan bahwa tidak “cerdasnya” pemerintah mengelolah sumber daya yang dimiliki.

Sebagai masyarakat yang menjadi objek sasaran dari kebijakan pemerintah ini, tentunya tidak terlepas dari apa yang dikatakan sebagai masyarakat yang memiliki kebebasan untuk memilih (menentukan jalan pemenuhan kebutuhan hidup), selaku pemerintah tentunya mampu memberikan atau memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan suplemen. Dalam konteks ini konsep Otonomi Daerah memiliki arti tersendiri, sebagai pemerintah daerah dalam konteks Otonomi Daerah bahwasannya pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing, tentunya pemerintah daerah mampu menentukan sikap--Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah--mana yang baik untuk masyarakatnya dan mana yang mampu menimbulkan hambatan dalam pencapaian taraf hidup masyarakatnya. Disamping itu, dalam konteks nasional bahwa dalam beberapa periode terakhir masa kepemimpinan bangsa ini telah banyak produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak lagi berpihak kepada masyarakat. Pemerintah seakan dijadikan kacang dalam politik internasional. Artinya bahwa pemerintah

Indonesia memiliki ketakutan dalam mengambil tindakan/keputusan mengenai intervensi asing terhadap sumber daya yang ada di Indonesia.

Di tingkat lokal Kabupaten Sleman, pelaksanaan kebijakan ini telah berlangsung dua tahap. Pada tahap awal, dilaksanakan sosialisasi di tujuh kecamatan, masing-masing Kalasan, Sleman, Ngaglik, Depok, Gamping, Godean, dan Mlati. Program konversi gas tahap kedua yang telah digulirkan awal Mei 2008. Tercatat ada 190.000 paket tabung dan kompor gas yang akan dibagikan pada masyarakat DIY. Pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke gas (LPG) masih menemui berbagai kendala atau hambatan di lapangan. Salah satu kendala utamanya adalah menyangkut perubahan kebiasaan (kultur) sebagian besar masyarakat di wilayah Sleman yang sudah sangat akrab dengan minyak tanah sebagai sumber energi rumah tangga. Dan permasalahan lain yang ditimbulkan adalah berdasarkan pengalaman distribusi tahap pertama ada warga yang sudah memakai kompor gas juga mendapatkan jatah paket gas elpiji. Untuk distribusi tahap kedua, bagi warga yang sudah memakai gas elpiji tidak akan diberi.<sup>14</sup>

Sehingga pada tahap awal pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah harus menekankan pada bagaimana mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung lama tanpa menimbulkan gejolak dan permasalahan baru bagi mereka dan perbaikan pada aspek pendistribusian. Menyangkut proses perubahan kultur tersebut, hal yang terpenting adalah bagaimana membentuk persepsi

---

<sup>14</sup> Kompas, Selasa, 02 Oktober 2007



masyarakat tentang pentingnya kebijakan konversi minyak tanah ke gas (LPG) sebagai sumber energi utama rumah tangga bagi masyarakat Kabupaten Sleman. Sebab, jika persepsi masyarakat tentang pentingnya beralih menggunakan gas (LPG) untuk memenuhi berbagai kebutuhan energi rumah tangga sudah terbentuk, maka dengan sendirinya program konversi minyak tanah ke gas (LPG) akan berlangsung dengan lancar tanpa menimbulkan permasalahan baru bagi mereka. Atas dasar hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Sleman tentang kebijakan konversi minyak tanah ke gas (LPG) melalui penelitian ini.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana persepsi masyarakat di Kabupaten Sleman terhadap kebijakan pemerintah tentang pengalihan penggunaan minyak tanah ke gas (LPG) yang akan diterapkan pada mereka.

Agar penelitian terarah dan adanya keterbatasan kemampuan peneliti, maka peneliti akan membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan pada masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya masyarakat di Kabupaten Sleman.
2. Objek penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Sleman sebagai pengguna minyak tanah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul, *“Bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Sleman terhadap kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Bahan Bakar Gas (LPG) tahun 2008?”*

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi atau respon masyarakat Kabupaten Sleman sebagai objek dari kebijakan konversi minyak tanah ke gas (LPG).

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Mengetahui sejauh mana perumusan kebijakan dalam mengakomodir segala kebutuhan primer, sekunder, dan suplemen masyarakat.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari kegiatan perkuliahan.

b. Bagi Pemerintah

Adanya kritik dan saran yang diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga bisa melakukan perumusan kebijakan yang lebih baik dari kebijakan yang telah ada dan yang akan dijalankan.

c. Bagi Dunia Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi, referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian sejenis di kemudian hari.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antar variabel berdasarkan konsep atau definisi tertentu, sehingga akan tampak sangat jelas sistematis dan ilmiah dalam melakukan penelitian. (masri Singarimbun dan Sofyan Effendi 1986::34)

Maka dari itu, dalam melakukan penelitian sebagai unsur yang penting adalah teori, karena memiliki peranan yang sangat besar dalam melakukan dan mencoba menjelaskan permasalahan atau fenomena yang ada. Menurut F.N, Kerlinger, dalam *bukunya Foundating of Behavioral Research* mengatakan bahwa:

“Teori merupakan suatu rangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep” (Jimmy Mohammad Ibrahim,, 1999: 33)

Sedangkan *Koentjaraningrat* berpendapat bahwa:

“Teori merupakan pernyataan mengenai sebab-akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat” (Koentjaraningrat, 1990: 87)

Defenisi-defenisi tersebut di atas, mengandung tiga hal, yaitu :

- a. Teori adalah serangkaian proposisi antar konsep yang saling berhubungan.
- b. Teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep.
- c. Teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya serta bagaimana bentuk hubungannya.

Jadi teori merupakan landasan awal dalam melihat dan menentukan fenomena yang akan dan belum akan terjadi, baik dalam waktu yang sama ataupun berbeda pula.

## **1. Persepsi**

Persepsi pada hakekatnya adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahaminya informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penciuman dan penghayatan. Untuk dapat

mengetahui suatu persepsi, terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, bukan sesuatu tentang dilakukan seseorang dan memahami informasi mengenai lingkungannya. Proses pemahaman ini melalui penglihatan, pendengaran dan perasaan. Fungsi persepsi itu dipengaruhi tiga variabel, yaitu: objek atau peristiwa yang dipahami, lingkungan terjadinya persepsi dan orang-orang yang melakukan persepsi.

Subproses dalam persepsi terdiri dari tiga macam bentuk, yang menunjukkan sifat persepsi merupakan hal yang kompleks dan interaktif. Sub proses yang pertama adalah stimulus atau situasi atau objek yang hadir. Selanjutnya adalah registrasi, interpretasi dalam masa registrasi, seseorang menerima informasi melalui penginderaan, seseorang tersebut akan menerima semua informasi yang terdengar atau terlihat padanya lalu kemudian timbul interpretasi tergantung bagaimana seseorang memulai pendalaman, motivasi dan kepribadian orang yang mempunyai persepsi. Sub proses yang terakhir yaitu umpan balik yang merupakan reaksi dari objek persepsi.<sup>15</sup>

Dikemukakan oleh para ahli, Bima Walgito:

“Persepsi merupakan proses pengorganisasian terhadap stimulasi yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integral dalam diri manusia.”<sup>16</sup>  
Dikatakan bahwa persepsi itu merupakan aktivitas yang integral.

---

<sup>15</sup> Miftah Thoha. *Perilaku Organisasi (Konsep Dasar dan Aplikasinya)*. PT. Garfido Persadda. 1990. Hal: 53

<sup>16</sup> Bimo walgito, *Psikologi Sosial Sebagai Pengantar*, Andi Offset, Yogyakarta. 1991. Hal:54

Hal ini mengandung arti bahwa seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut berperan dalam persepsi.

Kemudian **Saparinah Saldi** mengartikan persepsi sebagai berikut:

“Persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif dimana yang memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenalinya, tetapi ia juga sebagai keseluruhan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasinya dengan sikap-sikap yang relevan terhadap stimulus tersebut.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, **Miftah Thoha** memberikan batasan persepsi sebagai berikut:

“Persepsi pada bentuknya dalam proses kognitif, yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasinya.<sup>18</sup>

Bentuk persepsi seseorang akan menentukan bagaimana seseorang bersikap berkenaan dengan objek tertentu yang tidak terlepas dari kondisi lingkungan dimana seseorang bertempat tinggal. Artinya, seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya namun suatu ketika lingkungan diciptakan kesesuaian dengan persepsi yang dimiliki seseorang sebagai suatu pandangan terhadap suatu hal, terhadap *value system* yang dianut oleh masyarakat. Lingkungan tentunya sangat berpengaruh terhadap suatu hal, maka sistem nilai yang dianut masyarakat lingkungannya sangat berpengaruh terhadap pembentukan seseorang.

---

<sup>17</sup> Suparinah Saldi, *Persepsi Sosial mengenai Prilaku Menyimpang*. LP3S. Jakarta, 1986:72

<sup>18</sup> Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali, Jakarta. 1983:183

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses mental individu didalam memberikan pandangannya terhadap sesuatu hal atau objek, sehingga menghasilkan sikap tertentu dalam diri individu yang bersangkutan. Karena sikap individu-individu yang berbeda akan melihat hal yang sama dengan cara-cara yang berbeda. Dengan kata lain, persepsi merupakan bentuk pola pikir seseorang dalam memahami suatu fenomena atau objek tertentu yang sangat objektif.

Persepsi timbul karena adanya 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya tergantung pada proses pemahaman sesuatu termasuk didalamnya sistem nilai, tujuan, kepercayaan dan tanggapan terhadap hasil yang dicapai. Sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan. Kedua faktor ini menimbulkan persepsi karena didahului sesuatu proses yang dikenal dengan komunikasi. Komunikasi antara subjek yang melakukan atau mempunyai persepsi dengan objek persepsi.

Untuk membedakan persepsi dengan berpikir, Berlyne melihat terdapat 4 (empat) aspek yang dapat membedakan persepsi dari berpikir adalah: *Pertama*, hal-hal yang diamati dari sebuah rangsangan bervariasi tergantung pola dari keseluruhan dimana rangsangan tersebut menjadi bagiannya. *Kedua*, persepsi bervariasi dari orang ke orang dan dari waktu ke waktu. *Ketiga*, persepsi bervariasi tergantung dari arah (fokus) alat-alat indera. *Keempat*, persepsi cenderung berkembang ke arah tertentu dan sekali

terbentuk kecenderungannya itu biasanya akan menetap. Persepsi mempunyai tiga macam dimensi yaitu:

a. Pengetahuan

Apa yang kita ketahui (atau kita anggap tahu) tentang pribadi lain dalam wujud lahiriah, perilaku masa lalu, perasaan, motif dan sebagainya.

b. Pengharapan

Gaagasan kita tentang orang itu menjadi apa dan mau melakukan apa dipadukan dengan gagasan kita tentang seharusnya dia menjadi apa melakukan apa.

c. Evaluasi

Kesimpulan tentang seseorang, didasarkan pada bagian mana seseorang (menuntut pengetahuan kita tentang mereka) menjadi pengharapan kita tentang dia.

Pengetahuan, pengharapan dan evaluasi merupakan tiga unsur yang saling berkaitan. Seseorang mempunyai pengharapan akan orang lain atau kelompok lain, karena ia mengetahui orang atau kelompok tersebut. Dan seseorang bisa memberikan penilaian tentang orang lain atau kelompok tersebut karena ia tahu dan mempunyai pengharapan terhadap orang atau kelompok tersebut.



Dalam proses pembentukan suatu persepsi tak terlepas dari syarat atau ketentuan yang tercakup dalam proses persepsi itu sendiri. Syarat atau ketentuan-ketentuan yang wajib ada, yaitu:

- a. Objek atau sasaran yang harus diamati,
- b. Alat indera yang cukup baik,
- c. Perhatian yang dalam hal ini merupakan persiapan dalam mengadakan pengalaman.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan persepsi seseorang adalah:

- a. Psikologis

Yakni dimana kondisi psikis seseorang pada saat memberikan persepsi tentang suatu objek tertentu.

- b. Famili

Persepsi seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh persepsi dari orang tua. Orang tua telah mengembangkan suatu cara yang khusus dalam memahami atau melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya.

- c. Kebudayaan

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu merupakan salah satu faktor yang kuat dalam mempengaruhi sikap, nilai dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari persepsi adalah merupakan pandangan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu objek atau kejadian yang berada di sekelilingnya, yang mana suatu persepsi dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, kepentingan dan pengetahuan. Dengan kata lain, persepsi merupakan suatu tanggapan atau reaksi yang diberikan oleh orang lain atau kelompok melalui panca indera sehingga pengetahuan yang diterima kemudian dievaluasi dan selanjutnya dapat mencapai tujuan. Hal ini berarti setiap orang mempunyai perbedaan satu sama lain dalam menafsirkan suatu fenomena yang sama dalam waktu yang sama pula.

Dan dari indikator persepsi terhadap kebijakan konversi minyak tanah ke bahan bakar gas (LPJ) yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman sesuai yang ada di wilayah penelitian.

## **2. Kebijakan**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengartikan kebijakan sebagai pedoman dalam bertindak, mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana. (Wahab, 1991:2)

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, dalam Wahab (1991:21) mengklasifikasikan istilah kebijakan ke dalam sepuluh macam definisi yaitu:

- a. *Policy as label for field of activity* (kebijakan sebagai suatu merk bagi suatu bidang kegiatan tertentu).
- b. *Policy as expression of general purpose or desire state of affairs* (kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki).
- c. *Policy as specific proposals* (kebijakan sebagai usulan-usulan khusus).
- d. *Policy as decision of government* (kebijakan sebagai putusan-putusan pemerintah).
- e. *Policy as formal authorization* (kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal)
- f. *Policy as programe* (kebijakan sebagai program).
- g. *Policy as output* (kebijakan sebagai pengeluaran).
- h. *Policy as outcome* (kebijakan sebagai hasil akhir).
- i. *Policy as theory or model* (kebijakan sebagai teori atau model).
- j. *Policy as process* (kebijakan sebagai proses).

Masih dalam buku yang sama (1991:22), W.I Jenkins memandang kebijakan sebagai serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait, berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu.

Sementara itu Carl J. Friedrich dalam Islamy (1986:17) mendefinisikan kebijakan sebagai:

“Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”

Selanjutnya Raksasatya dalam Islamy (1986:17), mengemukakan konsep kebijakan sebagai berikut:

“Kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga element, yaitu:

- 1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai,
- 2) Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan,
- 3) Penyediaan berbagai *input* untuk memungkinkan pelaksanaan dari taktik dan strategi.”

Dari sudut pandang manajemen, proses kebijakan dipandang merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi paling tidak tiga kelompok kegiatan utama, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Analisis kebijakan
- b. Formulasi kebijakan
- c. Pelaksanaan kebijakan, dan
- d. Evaluasi kinerja kebijakan

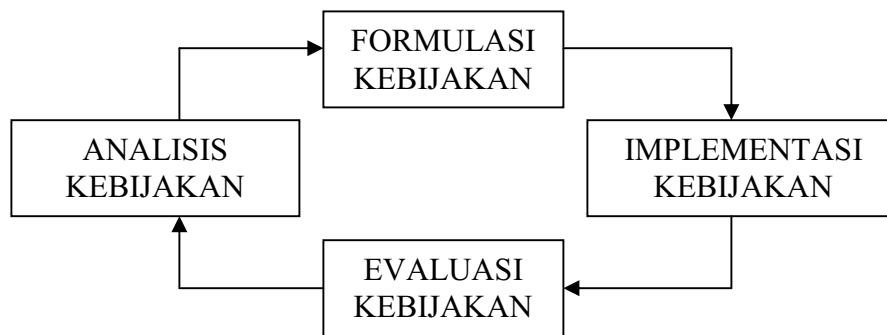
Dalam hal ini diharapkan bahwa pada tahapan penyusunan dan penentuan pemilihan kebijakan yang baik, tetapi perlu juga menaruh perhatian

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. Mustopaddidjaja. AR, “*Manajemen Proses Kebijakan Publik*”: LAN dan DUTA PERTIWI FOUNDATION. 2003. Hal: 6-7

pada perkembangan pelaksanaannya. Agar pelaksanaan kebijakan berlangsung secara baik dan mencapai hasil yang baik, perhatian perlu juga diberikan pada unsur sistem kebijakan dan dinamika pada proses kebijakan lainnya, yaitu tahapan pelaksanaan dan evaluasi kinerja kebijakan.

**Gambar 1.2.**  
Alur Pembuatan Kebijakan<sup>20</sup>



Proses kebijakan menyentuh kegiatan-kegiatan baik yang bersifat teknis maupun sosio-politis dan berlangsung dalam tatanan kelembagaan yang kompleks dengan latar belakang *stakeholders* yang cukup majemuk.

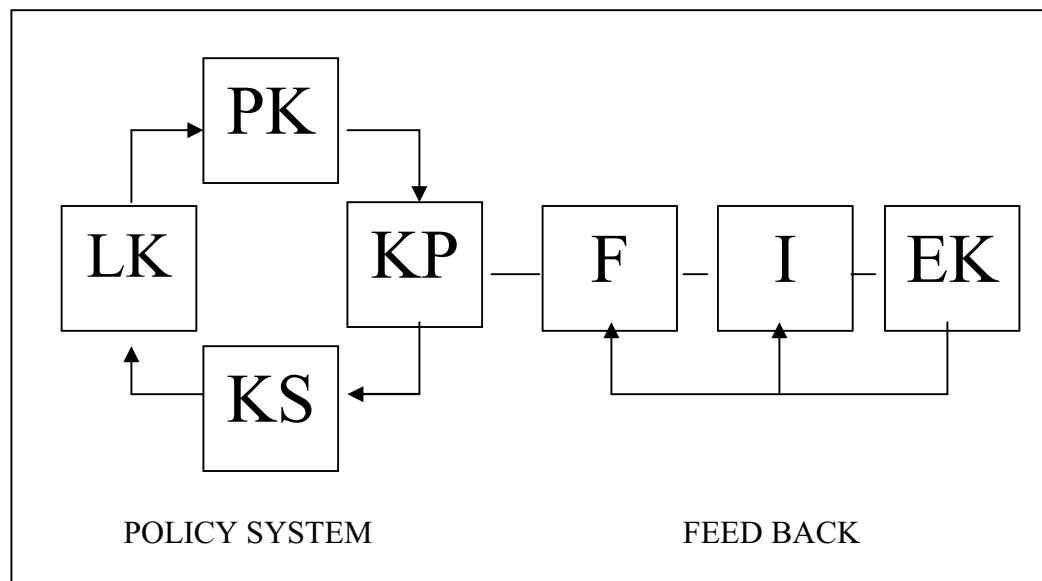
Sehubungan dengan substansi, lingkup permasalahan, dan cakupan kebijakan yang semakin luas, ada baiknya apabila terlebih dahulu dikenali konsep mengenai sistem kebijakan. Yang dimaksud dengan sistem kebijakan adalah tatanan kelembagaan yang berperan atau merupakan “wahana” dalam penyelenggaraan sebagian atau keseluruhan “proses kebijakan” (formulasi, implementasi dan evaluasi kinerja kebijakan) yang mengakomodasikan

---

<sup>20</sup> Disampaikan dalam Dosen Ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Chandra Sabtia Irawan, S.Ip dalam perkuliahan.

kegiatan teknis maupun sosio-politis serta saling berhubungan atau berinteraksi antar empat faktor dinamik, yaitu: lingkungan kebijakan, pembuat dan pelaksana kebijakan, kebijakan itu sendiri, dan kelompok sasaran kebijakan.

**Gambar 1.3.**  
Saling Hubungan Sistem dan Proses Kebijakan  
(Mustopadidjaja AR. 1985)<sup>21</sup>



Keterangan :

- LK : Lingkungan kebijakan
- PK : Pengelola kebijakan
- KP : Kebijakan publik
- KS : Kelompok sasaran
- F : Formulasi
- I : Implementasi
- EK : Evaluasi Kinerja

<sup>21</sup>Prof. Dr. Mustopadidjaja. AR, "Manajemen Proses Kebijakan Publik": LAN dan DUTA PERTIWI FOUNDATION. 2003. Hal: 7

Sebagaimana lazimnya suatu tatanan kelembagaan yang senantiasa mengandung dimensi nilai, demikian pula dengan sistem kebijakan. Dari berbagai pengertian mengenai istilah kebijakan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa kebijakan merupakan sekumpulan keputusan atau tindakan individu, kelompok, pemerintah ataupun swasta yang dapat dilaksanakan serta mempunyai pengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

### **3. Kebijakan Publik**

Pada dasarnya kebijakan publik adalah proses dimana terjadinya penentuan pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan apa yang tidak akan dilakukan oleh pemerintah<sup>22</sup>. Konsep yang dibangun tersebut sangat luas, karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika dihadapkan pada suatu masalah publik.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, Untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Maka dari itu, kebijakan publik dalam rangka

---

<sup>22</sup> Afan Gaffar, Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, 2000.

penyelenggaraan negara merupakan suatu stratifikasi kebijakan yang dari sudut manajemen dapat dibagi atas tiga kelompok, yaitu:

- a. Kebijakan umum (strategi),
- b. Kebijakan manajerial, dan
- c. Kebijakan teknis operasional.

Dari ketiga pembagian kelompok kebijakan tersebut saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Di Indonesia, kebijakan publik merupakan domain kalangan sekelompok elemen kecil dalam masyarakat.

Sementara itu, kalangan masyarakat kecil kebanyakan tidak terlibat langsung bahkan tidak sama sekalipun dilibatkan dalam setiap penentuan menyangkut nasib dan kepentingan masyarakat kebanyakan. Akibatnya banyak produk pemerintah yang dikeluarkan melalui suatu bentuk kebijakan atau peraturan kontroversial yang terkadang menitikberatkan beban pada masyarakat. Walaupun masyarakat secara tidak langsung diikutkan ataupun tidak diikutkan dalam perumusan kebijakan tersebut, tetapi kalau dalam proses implementasinya rakyat diwajibkan dan harus untuk dapat terlibat didalamnya,<sup>23</sup> maka kebijakan yang dikeluarkan itu juga akan dapat menuai berbagai macam bentuk reaksi. Hal seperti inilah yang terkadang cenderung kurang diperhatikan yang sebenarnya adalah menjadi permasalahan yang sensitif.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, 2000



Suatu proses implementasi kebijakan yang memiliki sikap kontroversial dari masyarakat seperti itu yang tidak mempunyai sikap akuntabilitas yang tergolong rendah. Sehingga bukanlah menjadi sesuatu hal yang terbilang baru jika terdapat banyak produk kebijakan atas dasar kebijaksanaan pemerintah menuai resistensi dari kalangan masyarakat karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Akibatnya timbul upaya memperbaiki atau mengubah kebijaksanaan publik (advokasi) yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun proses advokasi dalam pembentukan kebijaksanaan publik, meliputi:<sup>24</sup>

- a. Proses legislasi dan yudisiasi, meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan (*legal drafting*) sesuai dengan sistem konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang berlaku mulai penyusunan rancangan peraturan sampai peraturan berlaku secara resmi. Proses ini termasuk pengajuan rancangan banding atau pengujian substansi dan peninjauan ulang (*judicial Review*).
- b. Proses politik dan birokrasi, meliputi semua tahap formasi dan konsolidasi organisasi pemerintahan sebagai perangkat kelembagaan dan pelaksanaan kebijaksanaan publik. Bagian terpenting dan paling menentukan dalam keseluruhan proses ini adalah seleksi, rekrutmen dan induksi para aparatur pelaksana pada semua tingkatan birokrasi. Proses ini diwarnai oleh proses

---

<sup>24</sup> E Hermawan Politik Membela Yang Benar, KLIK dan DKN GB Yogyakarta 2001.

politik dan manajemen hubungan kepentingan-kepentingan diantara berbagai kelompok yang terlibat mulai dari lobi, mediasi, negosiasi, tawar-menawar, kolaborasi dan bahkan sampai pada praktek intrik, sindikasi, konspirasi dan manipulasi.

- c. Proses sosialisasi dan mobilisasi, meliputi semua bentuk kegiatan pembentukan kesadaran dan pendapat umum serta tekanan massa terorganisir yang akhirnya akan membentuk suatu pola perilaku tertentu. Proses ini terwujud dalam berbagai tekanan politik (*political pressure*), mulai dari penggalangan pendapat dan dukungan (kampanye, debat umum, rangkaian diskusi, seminar dan pelatihan), pengorganisasian (pembentukan basis-basis massa dan konstituen, pendidikan politik kader), sampai pada tingkat pengerahan kekuatan (unjuk rasa, mogok, boikot, blokade).

Sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam melakukan analisis kebijakan dapat dilihat “analisa kebijakan: metodologi, teknik, dan aplikasinya dalam pembangunan”.<sup>25</sup> Didalamnya juga terdapat konsep-konsep dasar pembuatan kebijakan publik secara rasional. Secara sederhana langkah-langkah dalam melakukan analisis kebijakan dapat dilihat sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Pengkajian persoalan

---

<sup>25</sup> Prof. Dr. Mustopaddidjaja. AR, “*Manajemen Proses Kebijakan Publik*”: LAN dan DUTA PERTIWI FOUNDATION. 2003

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 23-27

Tujuan dari pada kegiatan ini adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab-akibat<sup>27</sup>. Tiga bekal pokok yang perlu dimiliki untuk melakukan kajian adalah teori, metodologi dan informasi. Hal ini dimaksudkan agar rumusan tersebut harus nyata dan jelas pengertiannya dan terjabarkan dalam faktor-faktor penyebab (*independent variable*), dan faktor-faktor yang merupakan akibat (*dependent variable*).

b) Penentuan tujuan

Tujuan adalah akibat yang secara sadar ingin dicapai atau ingin dihindari. Secara umum suatu kebijakan selalu bertujuan untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang lebih banyak dan lebih baik atau mencegah keburukan-keburukan atau kerugian-kerugian semaksimal mungkin. Artinya, sifat realistis yang sesuai dengan nilai-nilai filsafat bangsa dan dengan kondisi sosial ekonomi negara dan masyarakat.

c) Perumusan alternatif

Alternatif adalah sejumlah alat atau cara-cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai, langsung atau tidak langsung, sejumlah tujuan yang telah ditentukan. Dapat juga dikaitkan sebagai pilihan-pilihan diluar

---

<sup>27</sup> Theory causalitas

alat atau cara-cara yang telah dipergunakan atau yang telah ada. Alasan munculnya alternatif kebijakan dikarenakan oleh beberapa hal yaitu; *pertama*, berdasarkan pengamatan terhadap kebijakan yang ada (tengah dijalankan) dan kemudian diperbaiki secara berangsur (*incremental*). *Kedua*, dengan melakukan semacam analogi dari suatu kebijakan dalam sesuatu bidang dan dicoba menerapkannya dalam bidang yang sedang dipelajari (*branching*). *Ketiga*, merupakan hasil dari pengkajian dari persoalan tertentu (*inventive*).

#### 4. Masyarakat

Masyarakat senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lain seperti hewan, manusia tidak akan mungkin hidup sendiri dan untuk mengetahui pengertian dari masyarakat yaitu sebagai berikut:

Menurut Linton, seorang ahli antropologi mengutarakan pendapatnya bahwa masyarakat adalah:<sup>28</sup>

“Setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan tertentu.”

Sedangkan menurut Koentjoroningrat, masyarakat adalah:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Linton dalam Abu Ahmadi, *Sosiologi Dan Antropologi*. Pelangi, Surabaya. 1985.Hal:68

<sup>29</sup> Koentjoroningrat. *Dalam Ketetapan-Keetapan Mpr Ri Tentang GBHN*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.1993. Hal:17

“Sekelompok atau kesatuan manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu yang terkait oleh rasa identitas kebersamaan.”

Selo Sumarjan menyatakan bahwa masyarakat adalah:<sup>30</sup>

“Orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”

Mayor Polak menyatakan bahwa masyarakat adalah:<sup>31</sup>

“Wadah segenap antara hubungan sosial yang terdiri banyak sekali kolektifitas serta kelompok-kelompok dan tiap-tiap kelompok yang lebih kecil (sub kelompok). Semua itu tersusun hirarkis (dari atas kebawah) atau berkesinambungan, sejajar dan setaraf ataupun saling tembus menembus.”

Dari beberapa pengertian tentang masyarakat diatas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa masyarakat adalah sekelompok atau kesatuan manusia yang telah lama hidup dan bertempat tinggal disuatu daerah tertentu dan saling berinteraksi menurut system adat istiadat tertentu dan terikat oleh rasa identitas kebersamaan, jadi dalam hal ini yang menjadi unsur masyarakat adalah:

- a. Harus ada kelompok (perkumpulan) manusia dan harus banyak jumlahnya.
- b. Telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah tertentu. Adanya aturan atau norma (undang-undang) yang mengatur tata hidup mereka, untuk menuju kepada tujuan yang sama.

---

<sup>30</sup> Disampaikan dalam mata perkuliahan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial&Politik. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. T.A 2004

<sup>31</sup>Anisda Rato. *Ringkasan Sosiologi*. PT Mitra Gama Widya. Yogyakarta. 1987. Hal:74

## 5. Pemerintah Daerah

Pengertian mengenai pemerintah memiliki dua arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kedua arti tersebut memiliki perbedaan dalam kekuasaan terhadap suatu wilayah. C. F. Strong mengatakan bahwa :

*“Governmen in the broader sense, is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military power the control of armed forces, secondly legislative power of the mean’s of making laws, thirdly financial power or the ability to extract sufficient money from the community to depray the cost of defending of state and or enforcing the law it makes on the state’s behalf.”*

Maksudnya, pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, baik ke dalam maupun ke luar. Oleh karena itu, *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang *kedua* harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang *ketiga* harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Sumendar, sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan

---

<sup>32</sup> Inu Kencana Syafie, *Manajemen Pemerintahan*, PT. PERTJA, Jakarta, 1998, hal. 17

kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan, komunikasi, peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legimitasi.<sup>33</sup>

Pemerintah dalam arti sempit adalah tugas atau wewenang atau kekuasaan dalam bidang eksekutif. Pemerintah daerah mempunyai tugas/wewenang atau kekuasaan eksekutif daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1, bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.<sup>34</sup>

Pemerintah Kabupaten dapat diartikan sebagai suatu unit organisasi yang wewenang dan kekuasaannya memerintah disuatu Kabupaten tertentu. Pemerintah selaku lembaga yang mempunyai wewenang dan kekuasaan terhadap suatu wilayah harus mampu berpikir kritis dalam menanggapi permasalahan.

Pemerintah daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan daerah yaitu pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>35</sup> Kepala Daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis, pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD.<sup>36</sup> Kepala

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 18

<sup>34</sup> Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999, Nomor 22. *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, BAB I, Pasal 1 point b 2000.

<sup>35</sup> Undang-undang No.34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal 174

<sup>36</sup> Undang-undang No.22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Menyatakan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala

daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, dan perangkat daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratannya dan tata caranya ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.<sup>37</sup>

Dalam kaitannya dengan penerapan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang otonomi daerah tentunya mampu menentukan sikap membela masyarakatnya.

## **G. Definisi Konseptual**

Defenisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Defenisi konseptual digunakan untuk menjelaskan makna kata-kata yang tertera dalam judul.

### **1. Persepsi**

Persepsi adalah pandangan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu objek atau kejadian yang berada disekelilingnya, yang mana

---

daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung.

<sup>37</sup> Undang-undang No. 34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal: 175



suatu persepsi dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, kepentingan dan pengetahuan.

## **2. Kebijakan**

Kebijakan merupakan serangkaian pedoman atau keputusan dalam melakukan tindakan ataupun tidak melakukan tindakan yang kemudian dijadikan arah dalam menentukan rencana pada pencapaian tujuan yang hendak dicapai.

## **3. Kebijakan Konversi**

Kebijakan Konversi adalah suatu program pengalihan penggunaan minyak tanah ke bahan bakar gas (LPJ) yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai upaya untuk penghematan energi.

## **4. Masyarakat Sleman**

Masyarakat Sleman adalah sekumpulan manusia yang telah lama hidup dan bertempat tinggal di Sleman dan berperilaku menurut sistem adat istiadat serta pola kehidupannya ditentukan dan diatur oleh pemerintah Kabupaten Sleman.

## **5. Pemerintah Kabupaten Sleman**

Pemerintah Kabupaten Sleman adalah suatu organisasi yang bergerak dalam pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Sleman, yang mengatur

sistem administratur roda pemerintahan dan pola kehidupan masyarakat sleman.

## **H. Definisi Operasional**

Dalam penelitian sosial, maka konsep yang dipersoalkan hal-hal yang abstrak perlu dioperasionalkan untuk memperoleh kejelasan, apabila dilakukan pengukuran secara sistematis.

Defenisi operasional merupakan pedoman dalam menilai atau mengukur suatu variabel, sehingga diperoleh penelitian yang terarah. Dalam rangka implementasi suatu kebijakan, keterkaitannya dengan Pemerintah Kabupaten Sleman tentunya tak terlepas dari aspek lain atau pihak terkait dalam proses implementasi kebijakan tersebut yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Upaya dalam melibatkan pihak-pihak terkait dimaksudkan untuk dapat memaksimalkan perannya dengan cara memberikan motivasi dan pemikiran-pemikiran positif guna mencapai tujuan dari kebijakan tersebut yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu akan terarah apabila mengikuti kaedah-kaedah dalam sebuah perumusan sehingga akan dapat mempermudah dalam proses pengimplementasian guna mendorong pencapaian tujuan dengan maksimal. Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian maka operasionalisasi penelitian ini diarahkan pada masyarakat miskin pengguna minyak tanah di Kabupaten Sleman, sehingga dapat akan

diketahui bagaimana persepsi masyarakat Sleman terhadap kebijakan konversi minyak tanah ke gas (LPG) yang dijadikan responden dalam penelitian ini.

Dalam melakukan pengolahan data yang diperoleh di lapangan. Maka untuk mendapatkan asumsi atau persepsi masyarakat tentang kebijakan konversi minyak tanah ke gas (LPG) digunakan beberapa indikator, yaitu:

Sedangkan untuk mengukur suatu persepsi, sehingga memperoleh hasil dalam penilaian terhadap sesuatu yang mampu mengakomodir semua *interest* dapat diukur dengan menggunakan indikator:

1. Efektivitas

Penilaian Responden Terhadap tingkat Efektivitas Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Bahan Bakar Gas untuk mengatasi krisis energi

2. Efisiensi

Penilaian Responden Terhadap Tingkat Efisiensi dalam Penggunaan Tabung Gas

3. Responsivitas

Penilaian Responden Terhadap Tingkat Responsivitas Masyarakat Sleman Yang Telah Beralih Menggunakan Tabung Gas

4. Assurance

Penilaian Responden Terhadap Tingkat Keamanan Dalam Penggunaan Tabung Gas

## 5. Access

Penilaian Responden Terhadap Tingkat Access Dalam Perolehan Informasi Dan Pengaduan Terhadap Keluhan Dalam Menggunakan Tabung Gas.

Tabel. 1.9.  
Instrumen Pengukuran Persepsi Masyarakat<sup>38</sup>

NO	INDIKATOR	CONTOH PERTANYAAN YANG DIKEMBANGKAN
1.	EFEKTIVITAS	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Apakah kebijakan tersebut mampu mengatasi krisis energi sekarang ini?</li><li>➤ Apakah penerapan kebijakan tersebut dilakukan tepat waktu?</li><li>➤ Apakah dengan kebijakan tersebut efektif dalam mengurangi beban kehidupan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat?</li><li>➤ Apakah kebijakan tersebut tepat sasaran?</li><li>➤ Apakah dalam melakukan sosialisasi telah efektif dilaksanakan?</li></ul>
2.	EFISIENSI	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Apakah dengan adanya kebijakan tersebut dapat menekan pengeluaran masyarakat?</li><li>➤ Apakah dengan menggunakan tabung gas dari program konversi lebih hemat?</li><li>➤ Apakah dalam memberikan layanan penyaluran memakan waktu yang lama?</li><li>➤ Apakah dalam penggunaan tabung gas menghemat waktu dalam melakukan proses memasak?</li><li>➤ Apakah tabung isi ulang mudah diperoleh dipasaran?</li><li>➤ Apakah dalam pemeliharaan dan perbaikan perangkat tabung dan kompor konversi murah dan mudah dilakukan?</li><li>➤ Apakah harga tabung gas isi ulang dapat diperoleh dengan harga murah?</li></ul>

<sup>38</sup> Diadaptasi dari Zeihaml, Parasutaman & Berry. (1990)

3.	RESPONSIVITAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apakah masyarakat mulai beralih menggunakan gas LPG setelah mendapatkan tabung gas?</li> <li>➤ Apakah masyarakat mendukung kebijakan tersebut?</li> <li>➤ Apakah masyarakat menganggap bahwa penggunaan tabung gas penting?</li> <li>➤ Apakah pemerintah telah dianggap peka terhadap kesulitan dan himpitan yang dihadapi masyarakat dengan naiknya harga BBM?</li> <li>➤ Apakah dengan adanya kebijakan tersebut menjadi berita baik ditengah masyarakat?</li> <li>➤ Apakah dalam penyaluran tabung gas petugas tanggap terhadap masyarakat yang belum terdata?</li> </ul>
4.	ASSURANCE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apakah adanya jaminan keamanan dalam menggunakan tabung gas?</li> <li>➤ Apakah adanya jaminan pemerintah bahwa dalam menggunakan tabung gas lebih aman dan bersih?</li> <li>➤ Apakah pemerintah menjamin penggantian suku cadang yang rusak ketika paket konversi dibagikan?</li> </ul>
5.	ACCESS	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apakah masyarakat mudah mendapatkan informasi terhadap keluhan yang diidhadi?</li> <li>➤ Apakah masyarakat dengan mudah menghubungi petugas untuk mendapatkan pelayanan?</li> <li>➤ Apakah prosedur penyaluran tabung gas sederhana?</li> <li>➤ Apakah informasi dapat dengan mudah diperoleh dan jelas?</li> <li>➤ Apakah terdapat posko pengaduan?</li> </ul>

Sehingga peneliti dapat menarik hipotesa dari tolak ukur berupa persepsi yang meliputi kebijakannya, implementasi kebijakan konversi

minyak tanah ke bahan bakar gas (LPG) di Kabupaten Sleman dan manfaatnya terhadap masyarakat sleman itu sendiri.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempergunakan data yang dinyatakan dalam bentuk uraian, verbal (lisan) dan penggolongan/kualifikasinya bersifat teoritis dengan pengolahan data dilakukan secara rasional dengan mempergunakan pola berfikir tertentu menurut hukum logika.<sup>39</sup>

Dalam hal ini dalam penelitian survei data diperoleh dari responden dengan menggunakan questioner yang bertujuan menguji kebenaran dan mengetahui ada tidaknya hubungan dan pengaruh terhadap variabel yang digunakan untuk mengukur data.<sup>40</sup>

### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini dimaksudkan sebagai objek nyata yang akan diteliti, untuk mengetahui dan mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dasar

---

<sup>39</sup> Parsito “*Pengantar Metodologi Ilmiah*”, Bandung, 1987. Hal: 156

<sup>40</sup> Mashari dan Singarimbun dan Sofian Effendi, “*Metode Penelitian Sosial*”, 1982. Hal: 95

pemilihan Kabupaten Sleman sebagai lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupaten Sleman mendapat kesempatan pertama sebagai proyek percontohan kebijakan konversi minyak tanah ke gas (LPG) di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga hal paling mendasar yang dialami oleh sekelompok masyarakat adalah memberikan penilaian atau persepsi masyarakat di Kabupaten Sleman tersebut mengenai pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas (LPG). Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Sleman yang meliputi beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Moyudan, Godean, Gamping, Depok, Kalasan, Berbah, Prambanan, Ngeplak, Ngaklik, Sleman, Mlati, Seyegaan, Minggir, Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan.

Dalam memudahkan penyajian data dan pengolahan data maka wilayah penelitian dikalsifikasikan berdasarkan karakteristik wilayah, yang meliputi :

- a. Masyarakat kota, meliputi Kecamatan Sleman, Mlati, Ngaklik, Godean, Gamping, dan Kalasan.
- b. Masyarakat tengah (*middle town*), meliputi Kecamatan Seyangan, Depok, dan Berbah.
- c. Masyarakat desa, meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, Ngeplak, Prambanan, Moyudan, dan Minggir.

### 3. Sampel

Untuk menjamin adanya pemerataan maka peneliti mengambil sampel yang dilakukan secara acak (*sample random sampling*). Pengertian sampel *random sampling* (sampel acak sederhana). Sampel acak sederhana ialah sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau sasaran elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

Sehingga rumus yang dapat digunakan adalah :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Ket:

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : *Error* yang ditoleransi (0.1)

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{955}{1 + 955(0.1)^2}$$

$$n = \frac{955}{956(0.01)}$$



$$n = \frac{955}{9.56}$$

$$n = 99.89$$

Dibulatkan menjadi 100 responden

Jumlah responden di atas dibagi ke dalam tiga kategori yaitu masyarakat Sleman Bagian Kota sebanyak 20 KK, Sleman Bagian Tengah sebanyak 60 KK dan Sleman Bagian Desa sebanyak 20 KK. Penentuan jumlah responden di ketiga wilayah tersebut didasarkan atas proporsi jumlah kecamatan di setiap wilayah Kabupaten Sleman.

Penentuan jumlah responden dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data secara kolektif.

#### 4. Data dan sumber data

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna minyak tanah di Kabupaten Sleman.

##### a. Data primer

Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui pengamatan langsung maupun kuesioner

yang akan dilengkapi dengan wawancara, diperuntukkan bagi masyarakat yang menggunakan minyak tanah ke gas (LPG) di Kabupaten Sleman. Untuk memperoleh data tersebut, digunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu : *pertama*, dengan melakukan wawancara tidak terstruktur dan *kedua*, memberikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan selanjutnya diisi oleh masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini (daftar pertanyaan terlampir).

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperlukan dalam melengkapi informasi yang didapat dari data primer, yaitu berupa literatur, buku, surat kabar, bahan bacaan, bahan perkuliahan, dokumen resmi, *browsing* dan data sekunder lainnya yang diperlukan dalam melakukan kajian atau penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: observasi yang akan didukung dengan wawancara dan dokumentasi serta kuesioner.

a. Wawancara

Pengertian wawancara dapat disamakan dengan suatu proses komunikasi dengan melakukan *interview*. Sutrisno Hadi mengemukakan

bahwa *interview* dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan sistematis yang berdasarkan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui tanya jawab secara langsung dengan responden yang dilakukan secara tidak terstruktur, guna untuk mendapatkan data yang belum terungkap. Wawancara dimaksudkan untuk dapat menghimpun data sosial, terutama untuk mengetahui respon, tanggapan dan pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke gas (LPG) yang sedang berlangsung dalam kehidupan masyarakat Sleman.

b. Dokumentasi

Digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang ada hubungannya dengan penelitian ini berupa literatur, buku-buku, surat kabar, bahan bacaan, bahan perkuliahan, dokumen dan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Melalui dokumentasi akan diamati fenomena dari objek yang diteliti dari berbagai dokumen yang ada. Karena dokumentasi maka akan mendapatkan bahan klasik untuk meneliti perkembangan historis yang khusus, biasanya digunakan untuk menjawab persoalan tentang apa, kapan dan dimana. Jawabannya kemudian disusun secara konfigurasi yang khas dengan muatan fakta yang dinyatakan secara deskriptif.

c. Kuesioner

Suatu metode pengumpulan data dari responden yang dilakukan melalui daftar pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan maksud untuk memperoleh informasi yang relevan. Daftar pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan yang sifatnya tertutup (pilihan ganda) yang jawabannya telah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban yang lain.

6. Unit analisa

Sebagaimana yang ditekankan oleh peneliti di halaman-halaman sebelumnya, bahwa yang menjadi unit analisa dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin pengguna minyak tanah di Kabupaten Sleman.

- a. Masyarakat kota, meliputi Kecamatan Sleman, Mlati, Ngaglik, Godean, Gamping dan Kalasan. Jumlah responden sebanyak 20 orang. Jumlah pria 13 orang dan wanita 7 orang. Dan tingkat pendidikan reesponden SD/SLTP sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 11 orang, sedangkan dari Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 7 orang. Berdasarkan jenis pekerjaan responden yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 5 Orang, Swasta sebanyak 9 Orang, dan Ibu Rumah Tangga sebanyak 6 Orang.

- b. Masyarakat tengah (*middle town*), meliputi Kecamatan Seyegan, Depok, dan Berbah. Jumlah responden sebanyak 60 orang. Jumlah pria 35 orang dan wanita 25 orang. Dan tingkat pendidikan reesponden SD/SLTP sebanyak 15 orang, SLTA sebanyak 25 orang, sedangkan dari Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 20 orang. Berdasarkan jenis pekerjaan responden yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 15 Orang, Swasta sebanyak 25 Orang, dan Petani/ Pedagang sebanyak 20 Orang.
- c. Masyarakat desa, meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, Ngemplak, Prambanan, Moyudan, dan Minggir. Jumlah responden sebanyak 20 orang. Jumlah pria 12 orang dan wanita 8 orang. Dan tingkat pendidikan reesponden SD/SLTP sebanyak 11 orang, SLTA sebanyak 7 orang, sedangkan dari Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 2 orang. Berdasarkan jenis pekerjaan responden yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 0 Orang, Swasta sebanyak 11 Orang, dan Petani sebanyak 9 Orang.

## 7. Teknik analisa data

Pada analisa data yang digunakan dalam penelitian ini penyusunan menggunakan analisa kualitatif. Metode analisa kualitatif yaitu data yang dikumpulkan merupakan studi kasus dan bersifat monografis dan mudah untuk diklasifikasikan sehingga menghasilkan dat deskriptif terhadap perilaku

yang diamati. Dengan menggunakan teknik analisa kualitatif, maka data yang diperoleh itu dapat diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam proses analisa data ada tiga komponen pokok yang merupakan model yang saling terjalin atau model interaktif yaitu:

- a. Reduksi data, merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang dilakukan selama berlangsungnya proses penelitian.
- b. Sajian data, merupakan rangkaian informasi untuk mempermudah pemahaman yang disusun secara sistematis yang dapat berupa gambar, skema dan tabel sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.
- c. Penarikan kesimpulan, merupakan penarikan kesimpulan akhir yang dilakukan setelah pengumpulan data berakhir.

Pada penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah Analisa Skala Indeks.<sup>41</sup> Analisa Skala Indeks merupakan salah satu teknik dalam analisa yang digunakan untuk mengukur skala secara langsung dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu: persepsi, opini dan evaluasi. Jadi untuk dapat mengetahui tingkat persepsi masyarakat akan digunakan indeks dengan rumus:

---

<sup>41</sup> Disampaikan dalam mata perkuliahan analisis kuantitatif yang disampaikan oleh suranto

$$R = \frac{\Sigma \text{Indeksnya}}{N}$$

$$= \frac{(fa \times 5) + (fb \times 4) + (fc \times 3) + (fd \times 2) + (fe \times 1)}{N}$$

Keterangan:

- N : Jumlah populasi  
 Fa : Frekuensi yang menjawab option a  
 Fb : Frekuensi yang menjawab option b  
 Fc : Frekuensi yang menjawab option c  
 Fd : Frekuensi yang menjawab option d

Untuk dapat menghitung kriteria rumus yang digunakan adalah rumus

Interval Skala Indeks sebagai berikut:

$$I = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\Sigma \text{Kriteria}}$$

$$I = \frac{5 - 1}{5}$$

$$I = \frac{4}{5}$$

$$I = 0.80$$

Keterangan Kriteria:

Sangat baik : 4,21 - 5,00

Baik	: 3,41 - 4,20
Cukup	: 2,61 - 3,40
Kurang	: 1,81 - 2,60
Buruk	: 1 - 1,80



## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Umum Kabupaten Sleman**

##### **1. Keadaan Geografis**

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari 5 kabupaten di Propinsi DIY yang berada di bagian utara, dengan letak pada persimpangan kawasan strategis segitiga JOGLO SEMAR (Yogyakarta – Solo - Semarang).

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 107° 15' 03" dan 107° 229' 30" Bujur Timur, 7° 47' 30" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara lengkap, letak geografis dan batas wilayah Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini: <sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> BPS Sleman